

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Bandung dan SMK Negeri 3 Bandung belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan sehingga masih memerlukan penambahan luas lahan dan bangunan serta penambahan sarana ruang praktik/laboratorium keahlian agar sesuai dengan standar.

Prasarana pendidikan yang belum memenuhi standar sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Bandung antara lain lahan, ruang kelas, laboratorium bahasa, ruang kesenian, lapangan olahraga/upacara, laboratorium IPA terapan, ruang praktik/laboratorium kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, ruang guru serta jamban peserta didik. Sedangkan, prasarana pendidikan yang belum memenuhi standar sarana dan prasarana di SMK Negeri 3 Bandung meliputi lahan, ruang kelas, laboratorium bahasa, lapangan olahraga/upacara, laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium IPA terapan, ruang praktik/laboratorium kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, ruang praktik/laboratorium kompetensi keahlian multimedia, ruang praktik/laboratorium kompetensi keahlian manajemen logistik, ruang guru, jamban peserta didik, dan ruang sirkulasi. Sedangkan sarana ruang praktik/laboratorium keahlian yang belum memenuhi standar terdiri dari perabot, peralatan praktik, media pendidikan, dan perlengkapan lain yang berbeda-beda sesuai dengan kompetensi keahlian. Setelah mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, dilakukan perhitungan untuk memperoleh besaran biaya yang dibutuhkan untuk pemenuhan standar sarana dan prasarana.

Kebutuhan biaya pendidikan untuk pemenuhan luas lahan dan bangunan pada kedua objek penelitian mencapai nilai yang cukup tinggi. Kondisi tersebut

dapat terjadi karena perhitungan yang dilakukan mencakup besaran untuk pembelian lahan sebagai upaya perluasan, serta pembangunan untuk ruangan tambahan yang sebelumnya tidak tersedia dan pembangunan untuk ruangan yang belum memenuhi luas minimal. Penentuan harga untuk penambahan luas lahan dilakukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang besarnya disesuaikan dengan lokasi objek penelitian. Pembangunan ruangan diperhitungkan sesuai dengan sistem konstruksi bangunan gedung berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2019 dengan mengacu kepada Analisa Standar Belanja-Harga Satuan Pokok Pekerjaan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020.

Kebutuhan biaya pendidikan untuk penambahan sarana ruang praktik/laboratorium keahlian juga menghasilkan besaran yang cukup tinggi. Kondisi ini dapat terjadi karena sarana ruang praktik/laboratorium keahlian yang variatif, terutama peralatan praktik yang berbeda antarkompetensi keahlian serta harga satuan untuk peralatan tersebut yang cukup mahal. Penentuan harga untuk penambahan sarana ruang praktik/laboratorium keahlian ini berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) berdasarkan spesifikasi sarana yang diperlukan.

Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menghimpun biaya pendidikan untuk pemenuhan standar sarana dan prasarana antara lain menghimpun dana dari peserta didik/orangtua/wali peserta didik dalam bentuk sumbangan pembinaan pendidikan yang diterima oleh sekolah setiap bulan, mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat melalui Direktorat PSMK dan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan mengirimkan proposal permohonan bantuan, menjalin kerja sama dengan komite sekolah untuk mencari solusi agar kebutuhan biaya pendidikan untuk pemenuhan standar sarana dan prasarana dapat terpenuhi, serta membangun kerja sama dengan sumber lain yang tidak mengikat seperti kerja sama dengan perusahaan swasta atau yayasan tertentu. Dalam menghimpun biaya pendidikan ini diperlukan sinergitas seluruh pihak agar kebutuhan biaya pendidikan dalam rangka pemenuhan standar sarana dan prasarana dapat terpenuhi.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa implikasi berikut:

1. Satuan pendidikan harus melakukan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang belum mencapai standar. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar, akan berimplikasi pada keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan yang bersangkutan.
2. Satuan pendidikan harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dalam rangka pemenuhan standar sarana dan prasarana melalui berbagai upaya menghimpun dana dari sumber-sumber dana yang sah. Dengan terpenuhinya biaya pendidikan dalam rangka pemenuhan standar sarana dan prasarana, akan berimplikasi pada peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
3. Satuan pendidikan harus berupaya untuk menggali sumber dana lainnya yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan dalam rangka pemenuhan standar sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti membuat beberapa catatan rekomendasi terhadap masalah yang diteliti, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi satuan pendidikan

Berkenaan dengan kebutuhan biaya pendidikan dalam rangka pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan, satuan pendidikan senantiasa mengajukan bantuan untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan standar baik melalui permohonan bantuan kepada pemerintah, masyarakat ataupun sumber lainnya yang sah sesuai undang-undang.

Berkaitan dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar karena memerlukan biaya yang sangat besar maka, satuan pendidikan dapat mengajukan kerja sama strategis dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) serta perguruan tinggi untuk fasilitasi *teaching factory* baik dalam upaya

Salma Nur Sundus, 2020

ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran umum ataupun untuk sarana dan prasarana praktik setiap kompetensi keahlian.

2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Berkenaan dengan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memenuhi standar, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat diharapkan menyusun peta pencapaian sarana dan prasarana pendidikan untuk sekolah menengah kejuruan sehingga ketersediaan sarana dan prasarana dapat terkontrol dengan baik. Dengan demikian, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dapat menyusun langkah-langkah pemenuhan sarana dan prasarana sekolah menengah kejuruan secara bertahap hingga mencapai standar sarana dan prasarana.

Di samping itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dapat menjadi penghubung antara pihak asing ataupun pihak swasta untuk mengadakan upaya kerja sama dalam rangka pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan bagi sekolah menengah kejuruan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Berkenaan dengan penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian dengan objek penelitian dan jenjang pendidikan yang berbeda, serta menggunakan perhitungan yang berbeda pula jika bangunan dibuat lebih dari 2 (dua) lantai.